



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Alamat Kabupaten Minahasa, Kewarganegaraan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Alamat Kabupaten Minahasa, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 6 Februari 2024 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 08 September 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yaitu GMIM Imanuel Kayuroya dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor **7102CPK0809201000830** yang dikeluarkan pada 17 September 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa.
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang Anak Kandung yaitu : **ANAK KANDUNG**, Umur 12 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir Jakarta 09 Juni 2011, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor **7102CPLU0709201100859** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 04 Maret 2014.
3. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat menetap dan tinggal di Desa Kayuroya Jaga 3 Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Bulan Agustus Tahun 2011 Tergugat pergi bekerja keluar Negeri dan tidak pernah kembali lagi
5. Bahwa sejak Tahun 2014 Tergugat sudah memutuskan hubungan dengan Penggugat.
6. Bahwa Tergugat sejak Bulan April Tahun 2014 sudah tidak lagi menafkahi kebutuhan anak dan kebutuhan rumah tangga.
7. Bahwa Tergugat sudah melalaikan kewajibannya selama 10 Tahun sebagai Suami dan Ayah dalam sebuah Perkawinan.
8. Bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat di pertahankan lagi dikarenakan sudah tidak ada bentuk komunikasi dalam hal apapun antara Penggugat dan Tergugat selama 10 tahun.
9. Bahwa Anak Perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan sangat memerlukan perawatan, bimbingan, dan kasih sayang seorang ibu, karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan Hak Asuh anak sepenuhnya diberikan kepada Penggugat sebagaimana Penggugat telah merawat dan membesarkan anak seorang diri sejak Tergugat meninggalkan Penggugat 12 Tahun yang lalu dan tidak pernah kembali sampai sekarang, dengan diajukannya Gugatan ini oleh Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano berkenan dan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada Tanggal 08 September 2010 sesuai dengan Kutipan Kedua Akta Perkawinan Nomor **7102CPK0809201000830** yang dikeluarkan pada 17 September 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa Anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sampai ia dewasa dan hidup mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu supaya mengirimkan Salinan Putusan Cerai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 12 Februari 2024, tanggal 23 Februari 2024, panggilan melalui Jurusita tanggal 04 Maret 2024, panggilan sidang melalui Radio Republik Indonesia (RRI) tertanggal 4 April 2024, tanggal 24 April 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK0809201000830 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 17 September 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102CPLU0709201100859 tanggal 4 Maret 2014 atas nama ANAK KANDUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7102052202230002 dikeluarkan tanggal 22-02-2023 Nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Foto copy bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan asli surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi SAKSI PERTAMA dan Saksi SAKSI KEDUA yang memberikan keterangan sebagaimana berikut ini:

1. Saksi **SAKSI PERTAMA** di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami dan istri yang menikah di Minahasa pada 8 September 2010;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kayuroyah Kabupaten Minahasa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG, Umur 12 (Dua belas) Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adanya permasalahan karena Tergugat keluar dari rumah dengan alasan pergi bekerja sejak anak Penggugat dan Tergugat masih berusia 2 (dua) bulan dan sampai saat ini tidak kembali lagi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah membiayai anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi dengar dari orangtua Penggugat, terakhir kali Tergugat berkomunikasi dengan Penggugat yaitu Tahun 2014;
- Bahwa ada upaya Penggugat melalui keluarga untuk berdamai akan tetapi Tergugat tidak mau lagi;

2. Saksi SAKSI KEDUA di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah berteman dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami dan istri yang menikah di Minahasa pada 8 September 2010;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kayuroyah Kabupaten Minahasa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG, Umur 12 (Dua belas) Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adanya permasalahan karena Tergugat keluar dari rumah dengan alasan pergi bekerja sejak anak Penggugat dan Tergugat masih berusia 2 (dua) bulan dan sampai saat ini tidak kembali lagi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah membiayai anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi dengar dari orangtua Penggugat, terakhir kali Tergugat berkomunikasi dengan Penggugat yaitu Tahun 2014;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada upaya Penggugat melalui keluarga untuk berdamai akan tetapi Tergugat tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menggugat cerai Tergugat dikarenakan sejak Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 12 Februari 2024, tanggal 23 Februari 2024, panggilan melalui Jurusita tanggal 04 Maret 2024, panggilan sidang melalui Radio Republik Indonesia (RRI) tertanggal 4 April 2024, tanggal 24 April 2024, namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban yang berisi materi eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Tondano mengadili perkara *a quo*. Atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg persidangan dilanjutkan dengan *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka akan diuraikan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan dalilnya maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana termuat dalam gugatan tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang di bawah janji telah menerangkan berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dimana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, pada tanggal 8 September 2010 di hadapan Pemuka Agama Kristen telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya dicatatkan secara resmi sesuai hukum negara oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 17 September 2010;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen, dan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa maka berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk mengadili perkara *a quo* maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1 (satu) adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 1 (satu) setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 (dua) mengenai Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang menikah di Minahasa pada tanggal 8 September 2010 dan dicatat pada tanggal 8 September 2010, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7102CPK0809201000830, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 17 September 2010, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah bersesuaian dari 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan pada

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa sudah sekitar 12 (dua belas) Tahun Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya bersama Penggugat dan anak mereka tanpa alasan yang sah ataupun ijin dari Penggugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini yang mengasuh dan membiayai kehidupan anak adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah mencoba untuk berdamai kembali dengan Penggugat dan sampai dengan diperiksanya perkara *a quo* di persidangan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 12 (dua belas) Tahun sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terungkap dalam persidangan adalah merupakan alasan dapat terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) mengenai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Minahasa dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sebagaimana bukti P-1 dan tempat

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian terjadi adalah di Pengadilan Negeri Tondano yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Minahasa, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat pada tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan angka 3 (tiga) dengan perbaikan redaksional beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan dalam Pasal 102 huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang terlampir dalam surat gugatan dan bukti surat P-1 berupa fotocopy Akta Perkawinan yang diterbitkan di Kabupaten Mnahasa dan juga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraianya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai biaya perkara menurut hukum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini maka petitum gugatan angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada Tanggal 08 September 2010 sesuai dengan Kutipan Kedua Akta Perkawinan Nomor **7102CPK0809201000830** yang dikeluarkan pada 17 September 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat bernama ANAK KANDUNG berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan oleh Penggugat dan pembiayaan hidup oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat pada tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Nur Dewi Sundari, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Steven Christian Walukow. SH. dan Friska Yustisari Maleke, S.H. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 06 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, di dampingi oleh Sissylia O. Raming, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Steven Christian Walukow, S.H.

Nur Dewi Sundari, S.H. MH

Friska Yustisari Maleke, S.H. MH

Panitera Pengganti,

Sissylia Olivia Raming, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Proses	Rp100.000,00;
3. Redaksi	Rp10.000,00;
4.....Materai	Rp10.000,00;
.....	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
.....			
6.....	Panggilan	:	Rp680.000,00;
.....			
Jumlah		:	Rp850.000,00;
			(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)